

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Ciamis merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu Melaksanakan Kewenangan Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian Pendapatan Daerah;
- 2) Penyiapan Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan APBD;
- 3) Pengesahan Dokumen dalam Pelaksanaan Anggaran;
- 4) Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- 5) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 6) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- 7) Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- 8) Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 9) Penyimpanan Uang Daerah;
- 10) Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;
- 11) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

- 12) Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- 13) Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- 14) Pengelola utang dan piutang daerah;
- 15) Penagihan piutang daerah;
- 16) Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 17) Penyajian informasi keuangan daerah;
- 18) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
- 19) Perencanaan dan penyuluhan Pendapatan Daerah;
- 20) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pendapatan Daerah;
- 21) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Bupati.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

Adapun visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

a. Visi

Untuk menjamin terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif menuju terwujudnya Pemerintahan Yang Baik diperlukan adanya Pengelolaan Keuangan dan Aset yang andal melalui sistem Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan serta didukung sumber daya manusia yang handal.

Bertitik tolak dari kondisi di atas, visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dituangkan dalam rumusan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal Tahun 2023”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Utusan-Nya.
- b. Meningkatkan sumber daya yang berakhlak mulia, amanah, produktif dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Mewujudkan perekonomian daerah dan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan lokal.
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi bagaimana tersebut di atas, maka misi yang diemban Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh;

5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan;

3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

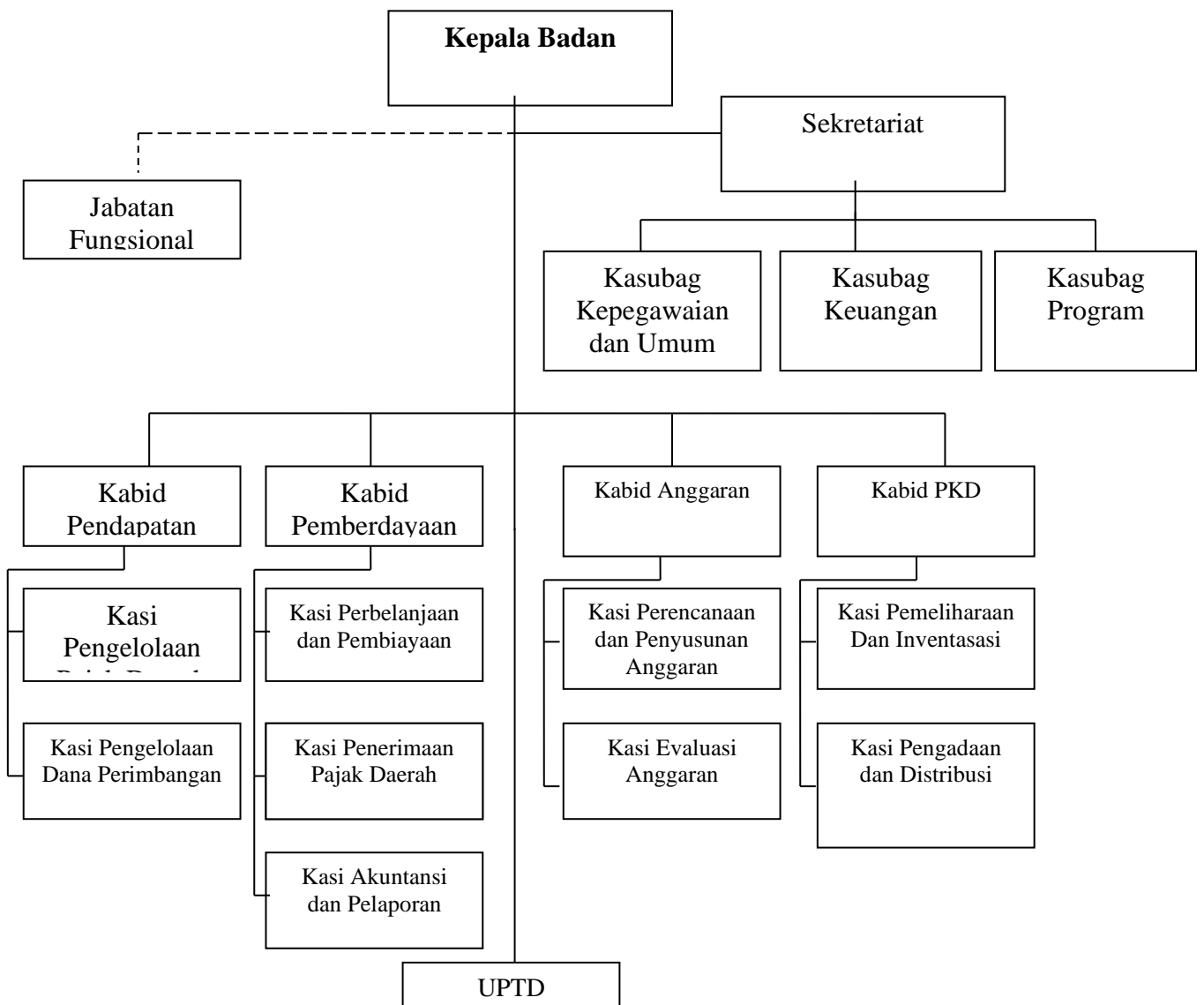
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Pendapatan
 - a. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan
4. Bidang Perbendaharaan
 - a. Seksi Perbelanjaan dan Pembiayaan
 - b. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah
 - c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
5. Bidang Anggaran
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
 - b. Seksi Evaluasi Anggaran
6. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi
 - b. Seksi Pengadaan dan Distribusi

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, 2023

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok, memimpin, merumuskan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

a. Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Tugas :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh kesatuan organisasi dinas;
- 4) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- 5) Pengelolaan rumahtangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
- 6) Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- 7) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 8) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Tugas :

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- 2) Penyusunan dan perumusan program pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- 3) Penyusunan rencana anggaran dinas;
- 4) Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- 5) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

c. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah dengan mengadakan observasi yang kemudian

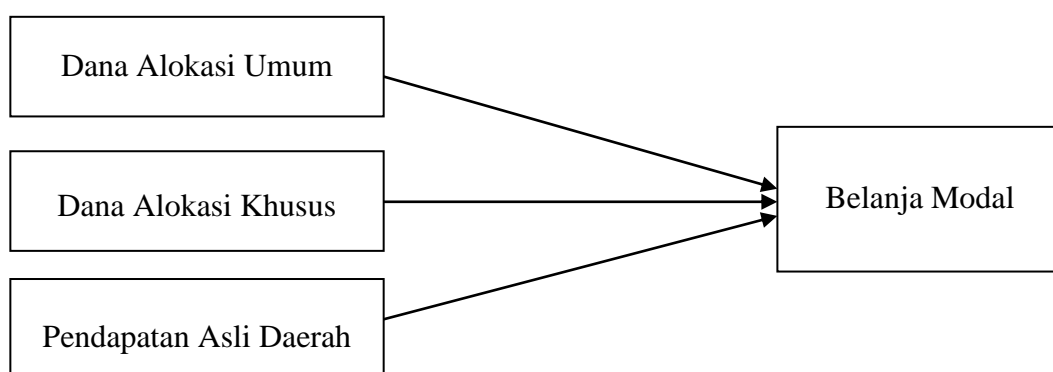
dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Menurut Sugoyono (2012:105) bahwa: “metode deskriptif analisis ialah “Analisis terhadap sampel tanpa dimaksudkan menarik kesimpulan yang berlaku bagi populasi. hasil Analisis hanya berlaku bagi sampel penelitian”.

Lebih lanjut Sudjana (2010:64) bahwa:

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang dengan perkataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Dengan demikian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis sehingga penulis akan menganalisis secara deskriptif mengenai pengaruh diferensiasi produk dan saluran distribusi terhadap keunggulan bersaing. Untuk lebih menjelaskan pengaruh diferensiasi produk dan saluran distribusi terhadap keunggulan bersaing, dibuat paradigma sebagai berikut:



Gambar 3.2 Paradigma Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan pendekatan data kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2015:81) bahwa:

Metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.

Dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan hubungan antara variabel dan pengaruhnya berdasarkan data dan informasi yang mendukung sesuai dengan sifat, permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian. Dari data informasi yang dikumpulkan penulis melakukan berbagai analisa untuk mencapai kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari untuk menarik kesimpulan. Sedangkan analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel bebas (*Independent Variabel*)

Sugiyono (2012:33) variabel bebas atau independen adalah “Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

dependen (terikat)". Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel independen adalah dana alokasi umum (X_1), dana alokasi khusus (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3)

2. Variabel Dependen (*Dependent Variabel*)

Sugiyono (2012:33) variabel dependen adalah "Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas". Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi variabel dependen adalah belanja modal (Y).

Untuk lebih jelasnya operasionalisasi variabel akan digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Satuan	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. (Bastian, 2007:84)	Total dana alokasi umum pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2012 – 2022.	Miliar Rupiah (RP)	Nominal
2. Dana Alokasi Khusus	Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Halim, 2014: 16)	Total dana alokasi umum pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2012 – 2022.	Miliar Rupiah (RP)	Nominal

Varibel	Konsep Variabel	Indikator	Satuan	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2011: 101)	1. Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisah 4. Lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Pasal 6)	Miliar Rupiah (RP)	Nominal
4. Belanja Modal	Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administratif umum. (Halim, 2011:72)	1. Belanja modal tanah 2. Belanja modal peralatan dan mesin 3. Belanja gedung dan bangunan 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 5. Belanja modal fisik/aset lainnya (PP No. 102/PMK.02/2018).	Miliar Rupiah (RP)	Nominal

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Dana alokasi umum sebagai sebagai variabel independen (X_1) jenis datanya sekunder. Untuk memperoleh data maka penulis menggunakan sumber data

berupa laporan dana alokasi umum pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2012 – 2022.

2. Dana alokasi khusus sebagai sebagai variabel independen (X_2) jenis datanya sekunder. Untuk memperoleh data maka penulis menggunakan sumber data berupa laporan dana alokasi khusus pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2012 – 2022.
3. Pendapatan asli daerah sebagai sebagai variabel independen (X_3) jenis datanya sekunder. Untuk memperoleh data maka penulis menggunakan sumber data berupa laporan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2012 – 2022.
4. Belanja modal sebagai sebagai variabel dependen (Y) jenis datanya sekunder. Untuk memperoleh data maka penulis menggunakan sumber data berupa belanja modal pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2012 – 2022.

3.2.3.2 Sumber Data

Menurut Nazir (2013: 58-59) jika dilihat dari segi pengumpulan datanya dapat diperoleh dari data primer dan data skunder. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer menurut Nazir (2013:58) merupakan sumber-sumber dasar yang terdiri dari bukti-bukti atau saksi utama dari kejadian (fenomena) objek yang diteliti dan gejala yang terjadi di lapangan. Sumber data primer dapat berupa:

catatan resmi yang dibuat pada saat acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto serta dokumentasi yang lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Nazir (2013:59) dikaitkan dengan sumber yang lain selain dokumen langsung yang menjelaskan tentang suatu gejala. Informan (subjek) adalah salah satunya sumber sekunder, sebagai sumber bergerak yang dapat memberikan keterangan mendalam (*indepth*) terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.2.3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati dan mengobservasi objek penelitian atau peristiwa/kejadian baik berupa manusia, benda mati, maupun alam. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan instansi yang berhubungan dengan variabel peneliti.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dalam peneliti ini metode dokumentasi digunakan penulis sebagai pendukung untuk mendapatkan data-data yang telah ada mengenai variabel yang akan diteliti.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan

secara *literature* lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencatatan dari data yang telah didokumentasikan oleh orang lain atau institusi lain sebelumnya (Sugiyono, 2015).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: jumlah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap variabel terikatnya yaitu belanja modal. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

β	= Koefisien regresi
a	= Konstanta
Y	= Belanja Modal
X_1	= DAU
X_2	= DAK
X_3	= PAD
e	= <i>error term</i>

2. Deteksi Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.

a. Deteksi Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independent. Apabila R^2 yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Sehingga hal tersebut merupakan indikasi terjadi multikolinearitas. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak salah satu penggunaannya dapat dilakukan dengan metode *Correlogram of Residual* dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabila *correlation* > 10 Artinya terdapat hubungan erat antara variabel bebas.
- Apabila *correlation* < 10 Artinya tidak terdapat hubungan erat antara variabel bebas.

b. Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana variabel interferensi memiliki varian yang tidak konstan. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross-section*, namun jarang terjadi pada data *time series*. Hal ini terjadi karena fluktuasi relatif stabil ketika perilaku data yang sama dianalisis dari

waktu ke waktu (Widarjono, 2013). Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan *Breusch pagan godfrey* dengan kriteria sebagai berikut:

- Prob. Chi-square $< 0,05$ Artinya terjadi gejala heteroskedastisitas.
- Prob. Chi-square $> 0,05$ Artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

c. Deteksi Normalitas

Menurut Sugiyono, (2011:126) deteksi normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat diuji dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai *Jarque Bera Statistic* (J-B) dengan X^2 tabel, yaitu:

- Prob. *Jarque Bera Statistic* $< 0,05$ Artinya residualnya berdistribusi tidak normal.

- Prob. *Jarque Bera Statistic* > 0,05 Artinya residualnya berdistribusi normal.

3.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)

Menurut Sugiyono, (2011:139) Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel bebas benar-benar berpengaruh terhadap variabel terikat secara terpisah atau parsial. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$H_0 : \beta_i \leq 0$, yang berarti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal

$H_a : \beta_i \geq 0$, yang berarti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak, jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $\text{prob } t_{stat} < 0,05$
- 2) H_1 diterima, jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $\text{prob } t_{stat} > 0,05$

2. Uji Statistik F

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Hipotesis pada uji F adalah:

$H_0 = \beta_{1,2,3} = 0$ yang berarti bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

$H_a = \beta_{1,2,3} \neq 0$ yang berarti bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{prob } t \text{ stat} < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{prob } t \text{ stat} > 0,05$ yang berarti H_0 diterima

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat (belanja modal) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Sugiyono, 2011).

Nilai *adjusted* R^2 merupakan koefisien determinasi yang disesuaikan, yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas, variabel bebas telah dibebaskan dari pengaruh *error times* secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) dapat dinyatakan dalam persentase dan rentang nilainya adalah $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil dapat dijelaskan dengan sangat terbatasnya kemampuan masing-masing variabel bebas untuk menggambarkan masing-masing variabel terikat. Berbeda dengan nilai koefisien itu sendiri, yang merupakan rasio nol banding satu, nilai koefisien determinasi (R^2) yang lebih besar dari 0,5 dianggap buruk. Oleh karena itu, jika menurut hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) di atas 0,5 maka model regresi linier berganda dapat dikatakan layak.